

Laporan: Ardi,
Baubau Post-Durasi
Times

*Disdukcapil
Buton
Selatan Jemput
Bola Peraka-
man E-KTP di
Wilayah Kepu-
lauan*

Laporan: Ardi

BUTON SELATAN, BP - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Buton Selatan bersama tim dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri melakukan pelayanan jemput bola perekaman KTP elektronik (E-KTP) di Kecamatan Siompu dan Siompu Barat.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program nasional Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan yang menasar wilayah terpencil, tertinggal, dan desa terluar (3T) kepulauan guna meningkatkan cakupan pelayanan administrasi kependudukan.

Kadis Dukcapil Buton Selatan Hariyati Kanang, SKM, M.Kes melalui Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Busel Salehuddin SE men-

Lanjut ke Hal: 7

SDN 1 Masiri Buton Selatan Terapkan Ujian Sekolah Berbasis Online, Siswa Gunakan Chromebook dan Google Form



Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP - SDN 1 Masiri Buton Selatan mulai menerapkan sistem ujian berbasis online untuk pelak-

DISDUKCAPIL BUTON SELATAN

TURUN KE PULAU SIOMPU DAN SIOMPU BARAT GUNAKAN GENSET LISTRIK DEMI CAPAI TARGET NASIONAL 99% REKAMAN E-KTP

HARIYATI KANANG, SKM, M.Kes
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Selatan

Disdukcapil Buton Selatan bersama Ditjen Dukcapil Kemendagri dan Disdukcapil Prov. Sultra melaksanakan pelayanan jemput bola perekaman E-KTP di Kecamatan Siompu dan Siompu Barat pada 5-9 Mei 2026. Layanan ini bagian dari Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan untuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) kepulauan.

- TIM PELAYANAN**
4 PETUGAS PUSAT, 3 PETUGAS PROV. SULTRA, DAN PETUGAS DISDUKCAPIL BUTON SELATAN.
- KENDALA & SOLUSI**
LISTRIK PLN BARU MENYALA SORE HARI. SOLUSINYA, MENGGUNAKAN GENSET AGAR PELAYANAN BISA DIMULAI SEJAK PAGI.
- ANTUSIAS WARGA TINGGI**
PELAYANAN DIMULAI PUKUL 08.30 WITA DAN BERLANGSUNG HINGGA MALAM HARI.
- LAYANAN LENGKAP**
PEREKAMAN BIOMETRIK DAN CETAK E-KTP LANGSUNG DI LOKASI MENGGUNAKAN PERANGKAT KHUSUS DARI KEMENDAGRI.
- TARGET NASIONAL**
TARGET PEREKAMAN E-KTP NASIONAL 99%. CAPAIAN BUTON SELATAN BARU 91%. WILAYAH DARATAN >90%, WILAYAH KEPULAUAN ~80%.
- LOKASI LAYANAN**
Kecamatan Siompu dan Siompu Barat, Buton Selatan
- WAKTU PELAKSANAAN**
5-9 MEI 2026
- WILAYAH SASARAN**
Daerah Kepulauan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar)

“ WILAYAH KEPULAUAN SEPERTI SIOMPU DAN SIOMPU BARAT MASUK KATEGORI WILAYAH 3T, JADI MENJADI PRIORITAS PROGRAM NASIONAL. KAMI MULAI PELAYANAN PUKUL 08.30 WITA MENGGUNAKAN GENSET. ANTUSIAS MASYARAKAT SANGAT TINGGI HINGGA PELAYANAN BERLANGSUNG SAMPAI MALAM.”
- SALEHUDDIN, SE
Kabisid Pengelolaan Informasi Adm. Kependudukan Disdukcapil Buton Selatan

“ PELAYANAN SEPERTI INI SANGAT S KARENA MASYARAKAT TIDAK PERLU LAGI DATANG JAUH-JAUH KE KANTOR DISDUKCAPIL. PETUGAS LANGSUNG TURUN KE LAPANGAN UNTUK MEMBANTU PEMBUATAN KTP. PROSES PEMBUATAN KTP ELEKTRONIK TIDAK DAPAT DIWAKILKAN KARENA HARUS MELALUI PEREKAMAN BIOMETRIK SECARA LANGSUNG.”
- HARIYATI KANANG, SKM, M.Kes
Kadis Dukcapil Buton Selatan

Krisis Gaji Dokter PTT 4 Bulan di Baubau Selesai, Layanan Puskesmas Kembali Stabil

Laporan: Prasatio M

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau akhirnya melunasi tunggakan gaji dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) daerah selama empat bulan setelah sempat terjadi penghentian pelayanan kesehatan di sejumlah Puskesmas pada Senin (18/5/2026). Pembayaran dilakukan pada Selasa (19/5/2026) dan langsung diikuti normalisasi layanan kesehatan dasar di seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau,



dr. Frederik Tangke Allo, SpB, menegaskan keterlambatan pembayaran bukan disebabkan kelalaian pemerintah daerah,

melainkan tersendatnya pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) Peruntukan Bidang Kesehatan dari pemerintah pu-

sat. “Mekanisme penganggaran daerah sangat bergantung pada

Lanjut ke Hal: 7

Ketua TP-PKK Buton Tengah Umi Noranah Azhari Dorong Pendidikan dan Kesehatan Keluarga di Talaga Raya

Laporan: Ardi

BUTON TENGAH, BP-Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah, menjadi fokus penguatan program kesehatan, pendidikan, dan pembinaan keluarga dalam kunjungan kerja Ketua TP-PKK Buton Tengah sekaligus Bunda PAUD Buton Tengah, Umi Noranah Azhari, S.Pd, Senin (18/5/2026). Dalam kegiatan tersebut, TP-PKK menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah kepulauan.

Kegiatan yang mer-



upakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Bupati Buton Tengah itu dihadiri Staf Ahli PKK Buton Tengah, Kartini Adam Basan, bersama jajaran pemerintah kecamatan, pen-

yuluh BKKBN, bidan desa, kader PKK desa, hingga petugas pendamping keluarga. Kehadiran rombongan disambut antusias warga Talaga Raya.

Dalam pertemuan di Balai Penyulu-

han Keluarga Berencana Kecamatan Talaga Raya, berbagai isu strategis dibahas, mulai dari penguatan kesehatan keluarga, percepatan penanga-

Lanjut ke Hal: 7

Pansel Selter JPT Baubau Kebuti Tahap Presentasi dan Wawancara



Proses Seleksi Terbuka (Selter) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Baubau

Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-Proses Seleksi Terbuka (Selter) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Baubau memasuki tahapan strategis berupa penulisan makalah, Senin (19/5), sebagai bagian dari upaya menarjaring pejabat pimpinan OPD yang profesional, visioner, dan adaptif terhadap tantangan pembangunan daerah.

Tahapan yang berlangsung di Aula Tut Wuri Handayani Dinas Pendidikan Kota Baubau itu diikuti 18 peserta yang memperebutkan tiga jabatan strategis, yakni Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BP-KAD), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Kepa-

la Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Sekretaris Daerah Kota Baubau selaku Ketua Panitia Seleksi, La Ode Darus Salam, S.Sos., M.Si, mengatakan, penulisan makalah menjadi instrumen penting dalam mengukur kapasitas ideologi, kepemimpinan, hingga kemampuan manajerial peserta.

“Pansel menentukan empat tema untuk masing-masing OPD. Tema tersebut kemudian dipilih peserta untuk dikerucutkan menjadi satu judul makalah yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kota Baubau,” ujar La Ode Darus Salam.

Ia menjelaskan, peserta diberi waktu selama 120 menit untuk

Lanjut ke Hal: 7

Krisis Gaji Dokter PTT 4 Bulan di Baubau Selesai, Layanan Puskesmas Kembali Stabil

transfer dana pusat sehingga ruang fiskal kami menjadi terbatas," kata Frederik dalam siaran pers, Selasa (19/5/2026).

Aksi penghentian pelayanan dilakukan sebagian dokter PTT setelah hak keuangan mereka sejak Januari hingga Mei 2026 belum diterima. Kondisi tersebut sempat mengganggu pelayanan pemeriksaan umum, layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), pemeriksaan kesehatan gratis, serta sejumlah program kesehatan masyarakat lainnya di beberapa Puskesmas Kota Baubau.

Untuk mengatasi situasi tersebut, Pemerintah Kota Baubau mengambil langkah percepatan penyelesaian keuangan daerah dengan menalangi pembayaran gaji tenaga medis sambil menunggu pencairan

DAU dari pemerintah pusat. "Dengan diselesaikannya pembayaran tunggakan gaji, pelayanan kesehatan kembali berjalan optimal," ujar Frederik.

Ia juga mengapresiasi para dokter PTT yang dinilai tetap menjaga profesionalisme selama menghadapi ketidakpastian pembayaran honor. Menurut dia, para tenaga medis masih memberikan pelayanan kepada masyarakat sebelum aksi penyampaian aspirasi dilakukan. "Kami mengapresiasi dedikasi dokter PTT yang tetap mengutamakan pelayanan publik," katanya.

Secara historis, keterlambatan pembayaran tenaga kesehatan akibat hambatan birokrasi anggaran bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020

hingga 2021, sejumlah daerah di Indonesia juga mengalami keterlambatan pencairan insentif tenaga kesehatan akibat verifikasi administrasi dan sinkronisasi data pusat-daerah yang lambat.

Fenomena serupa juga pernah terjadi di sejumlah negara berkembang. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization dalam beberapa laporan menyebutkan keterlambatan pembayaran tenaga kesehatan dapat memengaruhi stabilitas layanan primer, terutama di daerah dengan ketergantungan tinggi terhadap anggaran pemerintah pusat.

Pengamat kebijakan publik menilai kasus di Baubau menjadi peringatan penting mengenai perlunya reformasi tata kelola pembiayaan kesehatan

daerah. Ketergantungan terhadap transfer pusat dinilai membuat daerah rentan mengalami gangguan pelayanan ketika proses administrasi anggaran mengalami keterlambatan.

Frederik memastikan pemerintah daerah akan memperkuat koordinasi lintas sektor dengan pemerintah pusat agar penyaluran dana kesehatan dapat lebih tepat waktu. "Langkah evaluasi dan antisipasi akan kami tingkatkan agar hak tenaga medis terpenuhi dan mutu pelayanan publik tetap terjaga," ujarnya.

Kembalinya pelayanan Puskesmas di Baubau diharapkan mampu memulihkan akses kesehatan masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan dasar di daerah tersebut. (*)

SDN 1 Masiri Buton Selatan Terapkan Ujian Sekolah Berbasis Online, Siswa Gunakan Chromebook dan Google Form

din S.Pd, mengatakan, penerapan sistem online dilakukan untuk seluruh mata pelajaran, meski sebagian masih dilaksanakan secara offline.

"Ulangan akhir semester menggunakan sistem online untuk sembilan mata pelajaran. Untuk ujian sekolah juga sebagian besar sudah online, hanya tiga mata pelajaran yang masih offline, yakni Bahasa Inggris, Seni Budaya, dan KTBS" ujar Jalaludin, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, pelaksanaan ujian online dilakukan secara bertahap karena keterbatasan perangkat yang dimiliki sekolah. Dari total 53 siswa, sekolah saat ini hanya memiliki 18 unit laptop yang digunakan untuk ujian.

"Kami menggunakan tiga sesi ujian mulai pukul 08.00 sampai 12.30 Wita. Chromebook yang tersedia sebenarnya 15 unit, tetapi dua mengalami kerusakan.

Selebihnya kami tambah menggunakan laptop guru," jelasnya.

Ia menyebut, penggunaan sistem online memberikan banyak keuntungan bagi sekolah maupun tenaga pengajar. Selain menghemat penggunaan kertas dan biaya fotokopi, hasil ujian siswa juga dapat langsung diketahui melalui sistem.

"Kalau online, guru tidak lagi memeriksa lembar jawaban satu per satu. Nilai langsung muncul di akun guru setelah siswa selesai mengerjakan," katanya.

Jalaludin menambahkan, setiap guru membuat soal dalam bentuk digital sebelum dimasukkan ke Google Form. Jumlah soal disesuaikan dengan waktu ujian yang rata-rata berlangsung selama 90 menit.

"Biasanya sekitar 30 sampai 35 soal, tergantung mata pelajaran dan guru masing-masing," ungkapnya.

Ia berharap sistem

ujian berbasis online dapat diterapkan di seluruh sekolah di Kabupaten Buton Selatan. Namun menurutnya, kesiapan jaringan internet dan perangkat menjadi faktor utama keberhasilan pelaksanaan ujian digital.

"Sebenarnya diharapkan semua sekolah bisa online, tetapi tergantung kesiapan jaringan dan fasilitas masing-masing sekolah," ujarnya.

Terkait hasil ujian sekolah, Jalaludin menjelaskan nilai tersebut nantinya digunakan sebagai nilai ijazah siswa. Meski sistem zonasi masih berlaku untuk penerimaan siswa SMP, pihak sekolah tetap mendorong peserta didik agar mampu bersaing saat melanjutkan pendidikan.

"Kami ingin siswa-siswa SDN 1 Masiri tetap mampu bersaing ketika masuk SMP, baik di SMP 1 Batauga maupun SMP 3 Batauga," tutupnya. (*)

Disdukcapil Buton Selatan Jemput Bola Rekam E-KTP di Siompu dan Siompu Barat Terkendala Listrik, Warga Tetap Antusias

gatakan Buton Selatan menjadi salah satu daerah sasaran karena masih rendahnya capaian perekaman E-KTP dibanding daerah lain di Sulawesi Tenggara.

"Wilayah Buton Selatan memiliki banyak pulau kecil sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam menjangkau masyarakat. Daerah kepulauan seperti Siompu dan Siompu Barat masuk kategori wilayah 3T, yakni terluar, terpencil, dan tertinggal," ujarnya, Senin (18/5/2026).

Ia menjelaskan, tim pelayanan terdiri dari empat orang petugas dari pusat dan tiga orang dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Pelayanan berlangsung selama lima hari, mulai 5 hingga 9 Mei 2026.

Menurutnya, kendala utama di wilayah pelayanan adalah ke-

terbatasan listrik dan jaringan. Di Kecamatan Siompu Barat, listrik PLN baru menyalakan sekitar pukul 15.00 WITA. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak pemerintah kecamatan menyiapkan genset agar pelayanan tetap berjalan sejak pagi hari.

"Kami berangkat sejak pagi dan mulai pelayanan sekitar pukul 08.30 WITA menggunakan genset. Antusias masyarakat sangat tinggi sampai pelayanan berlangsung hingga malam hari," Lanjutnya.

Tidak hanya melakukan perekaman, Kata Salahudin tim juga langsung mencetak E-KTP di lokasi pelayanan menggunakan peralatan khusus yang dibawa langsung oleh tim dari Kementerian Dalam Negeri.

Dia pun mengungkapkan, target nasional perekaman E-KTP saat ini berada di angka 99 persen, sementara capaian Kabupaten Buton Selatan baru sekitar 91 persen. Untuk wilayah daratan, rata-rata capaian telah mencapai 90 persen, sedangkan wilayah kepulauan masih berada di kisaran 80 persen.

"Kurangnya kesadaran masyarakat masih menjadi tantangan. Di wilayah kepulauan, sebagian masyarakat merasa belum perlu KTP karena aktivitas sehari-hari mereka lebih banyak di laut," jelasnya.

Meski demikian, pihak Disdukcapil terus berupaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai inovasi dan program jemput bola

di seluruh kecamatan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Selatan Hariyati Kanang, SKM, M.Kes, menyambut baik pelayanan jemput bola tersebut karena dinilai memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.

"Pelayanan seperti ini sangat bagus karena masyarakat tidak perlu lagi datang jauh-jauh ke kantor Disdukcapil. Petugas langsung turun ke lapangan untuk membantu pembuatan KTP," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa proses pembuatan KTP elektronik tidak dapat diwakilkan karena harus melalui perekaman biometrik secara langsung oleh pemilik data. (*)

Ketua TP-PKK Buton Tengah Umi Noranah Azhari Dorong Pendidikan dan Kesehatan Keluarga di Talaga Raya

nan stunting, hingga pembinaan keluarga berkualitas. Pemerintah daerah menilai keterlibatan aktif kader PKK dan tenaga kesehatan menjadi kunci keberhasilan program pelayanan dasar masyarakat.

"Kolaborasi seluruh elemen sangat penting agar program kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan maksimal hingga ke desa-desa," ujar Umi Noranah Azhari di hadapan peserta kegiatan.

Selain agenda pembinaan keluarga, Ketua TP-PKK Buton Tengah juga meninjau pelaksanaan sunatan massal dan pemeriksaan kesehatan gratis yang dipadati warga. Layanan sosial tersebut dinilai membantu masyarakat, khususnya di kawasan kepulauan yang akses terhadap pelayanan

kesehatan masih membutuhkan perhatian pemerintah daerah.

Menurut Umi Noranah Azhari, pelayanan kesehatan berbasis masyarakat harus terus diperluas agar warga memperoleh akses yang merata. "Kegiatan sosial seperti ini bukan hanya bentuk pelayanan, tetapi juga upaya mendekatkan pemerintah kepada masyarakat," katanya.

Agenda kunjungan turut diisi dengan anjagsana dan tatap muka bersama para Bunda PAUD Kecamatan Talaga Raya. Pertemuan itu dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi dalam mendukung pendidikan anak usia dini sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Buton Tengah.

Secara nasional, penguatan peran keluarga dan percepatan

penanganan stunting menjadi program prioritas pemerintah sejak beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka prevalensi stunting nasional terus ditekan melalui kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, dan organisasi masyarakat. Sementara secara internasional, UNICEF dan WHO menempatkan pendidikan usia dini serta kesehatan keluarga sebagai indikator penting dalam pembangunan manusia berkelanjutan.

"Anak-anak adalah investasi masa depan daerah. Karena itu, pendidikan usia dini dan kesehatan keluarga harus menjadi perhatian bersama," tutur Umi Noranah Azhari menutup rangkaian kegiatan di Talaga Raya. (*)

Pansel Selter JPT Baubau Kebuti Tahap Presentasi dan Wawancara

menuangkan gagasan, inovasi, serta strategi pembangunan ke dalam karya ilmiah yang nantinya menjadi bahan penilaian pansel sebelum memasuki tahapan presentasi dan wawancara akhir.

"Setelah penu-

lisan makalah selesai, agenda langsung dilanjutkan dengan presentasi dan wawancara yang dijadwalkan berlangsung hingga 20 Mei di Aula Lantai 2 Kantor Wali Kota Baubau," katanya.

Menurut La Ode

Darus Salam, pola seleksi terbuka seperti ini merupakan bagian dari implementasi reformasi birokrasi nasional yang mulai diperkuat sejak diberlakukannya Undang-Undang Aparatur Sipil Neg-

ara Nomor 5 Tahun 2014. Regulasi tersebut mendorong sistem merit dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi guna menciptakan birokrasi yang profesional dan bebas intervensi politik.

Secara historis, me-

kanisme open bidding atau seleksi terbuka jabatan publik juga telah lama diterapkan di berbagai negara seperti Inggris, Australia, dan Korea Selatan sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan modern.

Di Indonesia, sistem serupa mulai diterapkan secara luas setelah reformasi birokrasi untuk memastikan pejabat publik dipilih berdasarkan kompetensi dan integritas.

"Harapan kami, tahapan seleksi ini

mampu melahirkan sosok pemimpin OPD yang kompeten, memiliki visi pembangunan yang kuat, serta mampu mengeksaminasi tantangan pembangunan Kota Baubau secara profesional," tutupnya. (*)

Di DPR, Prabowo Tekankan Pentingnya Oposisi dalam Demokrasi



Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato selama sekitar dua jam dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (20/5)

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP- Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato selama sekitar dua jam dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (20/5), dengan salah satu sorotan utama berupa apresiasi kepada PDI Perjuangan yang tetap memilih berada di luar pemerintahan. Pidato tersebut juga memuat paparan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) RAPBN 2027.

Dalam paparan ekonomi itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen pada 2027. Inflasi ditargetkan stabil pada level 1,5 persen hingga 3,5 persen, sementara nilai tukar rupiah diproyeksikan berada di rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.

Di sisi politik, Prabowo menekankan bahwa keberadaan oposisi

merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi modern. Ia menyebut PDIP telah mengambil posisi politik yang berperan menjaga mekanisme pengawasan terhadap pemerintah.

“Setiap pemimpin harus mau dikritik, setiap eksekutif harus diawasi, terima kasih atas pengawasan saudara,” ujar Prabowo Subianto dalam pidatonya di parlemen.

Ia juga secara terbuka menyampaikan apresiasi kepada PDIP yang memilih tidak bergabung dalam koalisi pemerintahannya. Menurutnya, sikap tersebut penting untuk menjaga keseimbangan demokrasi yang sehat.

“Setiap orang ingatkan kita, walau tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita,” ucap Prabowo dalam bagian lain pidatonya.

Secara historis, peran oposisi dalam sistem demokrasi Indonesia menguat sejak era Reformasi

1998, ketika ruang kebebasan politik mulai terbuka. Pola serupa juga dikenal dalam sistem parlementer seperti di Inggris dan sistem bipartisan di Amerika Serikat, di mana oposisi berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif.

Prabowo mengaku secara pribadi lebih menginginkan seluruh partai politik berada dalam satu koalisi pemerintahan. Namun ia menilai kondisi tersebut tidak ideal bagi demokrasi karena dapat mengurangi fungsi kontrol terhadap kekuasaan.

“Ada kalanya saya ingin semua partai masuk dalam pemerintahan, tetapi itu tidak baik bagi demokrasi,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyuarakan kritik dari kader PDIP yang dinilainya tajam terhadap kebijakan pemerintah. Ia menilai kritik tersebut sebagai bagian dari kontrol politik yang konstruktif.

Paparan KEMPPKF RAPBN 2027 ini menjadi momen pertama penyampaian kerangka kebijakan fiskal oleh presiden di DPR RI, sebuah praktik yang secara internasional lazim dilakukan dalam sistem demokrasi mapan seperti State of the Union di Amerika Serikat atau Budget Speech di Inggris.

Prabowo menegaskan bahwa stabilitas ekonomi dan politik harus berjalan beriringan untuk menjaga kepercayaan publik dan investor, terutama di tengah dinamika global yang tidak pasti serta fluktuasi nilai tukar mata uang.

Dengan kombinasi target ekonomi dan penekanan pada pentingnya oposisi, pidato tersebut menegaskan arah kebijakan pemerintah yang berupaya menyeimbangkan stabilitas fiskal, pertumbuhan ekonomi, serta penguatan institusi demokrasi. (*)

Menlu Sugiono Akui Sulit Akses Informasi WNI di Tahanan Israel



Ilustrasi. Menlu Sugiono respons WNI diculik penjajah Israel.

Laporan: Radit

JAKARTA, BP- Sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) dilaporkan ditangkap oleh otoritas keamanan Israel saat berada dalam pelayaran menuju Jalur Gaza, Palestina, pada Rabu (20/5).

Insiden tersebut terjadi ketika armada kemanusiaan yang membawa relawan internasional itu dicegat di wilayah perairan menuju Gaza. Pemerintah Indonesia kini masih berupaya memastikan kondisi para WNI yang terlibat dalam misi tersebut.

Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan bahwa pemerintah menghadapi keterbatasan akses informasi akibat minimnya jalur komunikasi langsung dengan pihak terkait.

“Sejauh ini informasi yang kita terima masih sulit karena komunikasi yang terbatas,” ujar Sugiono di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (20/5).

Kementerian Luar Negeri RI menyebutkan

telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak di Yordania dan Turki guna menelusuri kondisi para WNI, mengingat Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik langsung dengan Israel.

“Jadi kita sudah melakukan komunikasi dengan teman-teman di Kementerian Luar Negeri di Jordan dan Turki untuk memastikan kondisi rekan-rekan kita,” kata Sugiono.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengonfirmasi bahwa total sembilan WNI yang tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) dalam misi GSF 2.0 telah ditahan berdasarkan informasi terbaru yang diterima pemerintah.

Misi Global Sumud Flotilla sendiri merupakan bagian dari gerakan internasional yang bertujuan menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui jalur laut, yang kerap menandai ketegangan dengan Israel dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam catatan

sejarah, upaya sekoordinasi dengan sejumlah pihak di Yordania dan Turki guna menelusuri kondisi para WNI, mengingat Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik langsung dengan Israel dan menimbulkan korban jiwa, serta memicu kecaman luas dari berbagai negara, termasuk Indonesia.

Indonesia sejak lama konsisten menyuatkan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi internasional dan organisasi global, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai bagian dari politik luar negeri bebas aktif.

Meski demikian, keterbatasan hubungan diplomatik langsung dengan Israel membuat proses komunikasi terkait kondisi WNI di lapangan harus dilakukan melalui negara ketiga dan jalur tidak langsung.

Pemerintah Indonesia menegaskan akan terus memantau perkembangan situasi serta berupaya memastikan keselamatan seluruh WNI yang terlibat dalam misi kemanusiaan tersebut. (*)

Rakerwil NasDem Sultra, Gubernur Sultra ASR Dorong Kolaborasi Demi Masyarakat



Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan partai politik untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan pelayanan publik di Sulawesi Tenggara.

Laporan: Mashuri

SULTRA, BP-Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan partai politik untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan pelayanan publik di Sulawesi Tenggara. Penegasan itu disampaikan saat menghadiri Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) dan Sekolah Legislatif DPW Partai NasDem Sulawesi Tenggara di Hotel Claro Kendari, Senin (18/5/2026).

Menurut Andi Sumangerukka, partai politik memiliki posisi strategis dalam sistem demokrasi modern karena menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Di tengah tantangan pembangunan daerah, kolaborasi politik dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan kesinambungan program pembangunan.

"Partai politik bukan hanya alat kontestasi kekuasaan, tetapi harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan

kesejahteraan masyarakat," kata Andi Sumangerukka di hadapan peserta Rakerwil.

Ia menyebutkan, pembangunan nasional pada dasarnya bertujuan melindungi seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menghadirkan keadilan sosial sebagaimana amanat konstitusi.

Dalam forum tersebut, gubernur juga mengapresiasi pelaksanaan Sekolah Legislatif Partai NasDem yang dinilai mampu memperkuat kapasitas kader dan legislator daerah dalam menjalankan fungsi politik secara profesional dan berorientasi pada kepentingan publik.

"Demokrasi yang sehat membutuhkan kader-kader politik yang memahami aspirasi rakyat sekaligus memiliki kapasitas kepemimpinan," ujarnya.

Secara historis, peran partai politik dalam pembangunan telah menjadi bagian penting perjalanan demokrasi Indonesia sejak era reformasi 1998. Setelah tumbangnya rezim Orde Baru, sistem multi-

partai berkembang pesat dan membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam proses politik dan pemerintahan.

Di tingkat internasional, kolaborasi antara pemerintah dan partai politik juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan di sejumlah negara demokrasi seperti Jerman, Jepang, dan Korea Selatan. Negara-negara tersebut menempatkan stabilitas politik serta penguatan institusi demokrasi sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Andi Sumangerukka menilai iklim demokrasi Indonesia saat ini relatif kondusif dan memberikan peluang besar bagi penguatan pembangunan nasional maupun pengkaderan calon pemimpin daerah di masa depan.

"Demokrasi yang stabil akan melahirkan ruang pembangunan yang sehat, sekaligus menciptakan regenerasi kepemimpinan yang berkualitas," katanya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri saat ini mengusung visi pembangunan daerah menuju Sultra yang maju, aman, sejahtera, dan religius. Visi tersebut diarahkan untuk memperkuat sektor pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia.

Kegiatan Rakerwil dan Sekolah Legislatif tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai NasDem Prananda Surya Paloh, Ketua DPW Partai NasDem Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Ketua DPRD Sultra, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari.

Rakerwil tersebut diharapkan menjadi momentum penguatan konsolidasi organisasi sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan partai politik dalam mendukung agenda pembangunan di Sulawesi Tenggara. (*)

Andi Sumangerukka Tekankan Kehadiran Nyata ASN untuk Warga Sultra



Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara lebih responsif terhadap persoalan masyarakat,

Laporan: Lisna

SULTRA, BP-Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara lebih responsif terhadap persoalan masyarakat, terutama menghadapi ancaman banjir akibat meningkatnya curah hujan di sejumlah wilayah Sultra dalam beberapa bulan terakhir.

Permintaan itu disampaikan Andi Sumangerukka saat memimpin Apel Gabungan ASN Pemprov Sultra di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Senin (18/5/2026). Dalam arahannya, gubernur menekankan pentingnya kehadiran nyata pemerintah melalui tindakan cepat dan solusi konkret yang dirasakan langsung masyarakat.

"Jangan hanya membersihkan lingkungan kantor saja, tetapi lihat daerah-daerah yang memang urgen untuk dilakukan pembersihan agar dampak banjir bisa diminimalkan," kata Andi Sumangerukka di hadapan peserta apel.

Menurut gubernur, informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan intensitas curah hujan di Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan dan berpotensi memicu banjir di sejumlah daerah. Kondisi tersebut harus direpsons dengan langkah mitigasi yang terukur dan terkoor-

dinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD).

Ia menjelaskan, banjir tidak hanya dipicu tingginya debit air, tetapi juga dipengaruhi buruknya sistem drainase dan penumpukan sampah di saluran air. Karena itu, seluruh OPD diminta memperkuat sinergi dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mengoptimalkan program hari bersih-bersih setiap Selasa.

"Makna kehadiran negara bukan sekadar kegiatan seremonial atau publikasi, tetapi bagaimana pemerintah mampu memberi solusi atas persoalan masyarakat," ujarnya.

Dalam sejarah penanganan bencana di Indonesia, persoalan banjir perkotaan menjadi tantangan yang terus berulang. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, banjir merupakan bencana paling dominan di Indonesia dalam satu dekade terakhir, terutama dipengaruhi perubahan tata ruang, kerusakan lingkungan, dan curah hujan ekstrem akibat perubahan iklim global.

Secara internasional, Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) juga pernah melaporkan bahwa peningkatan suhu global berdampak pada perubahan pola hujan di berbagai negara, termasuk Sulawesi Tenggara. Fenomena cuaca ekstrem tersebut menyebabkan frekuensi banjir meningkat di sejumlah kota besar dunia dalam beberapa tahun terakhir.

Andi Sumangerukka menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia meminta ASN tidak bekerja secara administratif semata, melainkan mampu hadir langsung di tengah masyarakat saat menghadapi persoalan lingkungan maupun sosial.

"ASN harus peka terhadap kondisi sekitar dan bergerak cepat ketika masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah," katanya.

Selain menyoroti mitigasi banjir, gubernur juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan melalui pola hidup sehat, olahraga rutin, serta membanjir pola pikir positif agar daya tahan tubuh tetap terjaga di tengah aktivitas pelayanan publik yang padat.

Melalui apel gabungan tersebut, Pemprov Sultra berharap seluruh ASN semakin meningkatkan disiplin, kepedulian, dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga menargetkan terciptanya budaya kerja yang lebih responsif terhadap dinamika lingkungan dan kebutuhan warga.

Langkah antisipasi banjir dan penguatan pelayanan publik itu dinilai menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin dirasakan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Sulawesi Tenggara. (*)

Pemkab Buton Perkuat Dukungan PAUD di HUT ke-76 IGTKI-PGRI



Suasana semarak mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI)-PGRI tingkat Kabupaten Buton yang digelar di pelataran Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton, Senin (18/5/2026).

Pewartu: La Harman

BUTON BP-Suasana semarak mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI)-PGRI tingkat Kabupaten Buton yang digelar di pelataran Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton, Senin (18/5/2026). Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi para pendidik PAUD, tetapi juga momentum penguatan komitmen membangun fondasi karakter anak usia dini menuju generasi emas Indonesia.

Peringatan HUT IGTKI-PGRI Tahun 2026 dirangkaikan dengan Festival Anak Bergerak Ceria (ABC) yang menampilkan beragam kreativitas siswa taman kanak-kanak. Acara diawali penampilan Marching Band TK Kema-la Bhayangkari 31 Buton, dilanjutkan fashion show dari sejumlah TK di Kabupaten Buton, dan ditutup dengan senam 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang diikuti seluruh TK se-Kecamatan Pasarwajo.

Wakil Bupati Buton, Syarifudin Saafa, ST, yang mewakili Bupati Buton, menegaskan bahwa guru taman kanak-kanak memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, disiplin, dan kreativitas anak sejak usia dini.

“Terima kasih

yang tak terhingga saya sampaikan kepada seluruh pendidik TK yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan kasih sayangnya dalam mendidik tunas-tunas bangsa di Bumi Butoni yang kita cintai,” ujar Syarifudin di hadapan peserta kegiatan.

Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Buton berkomitmen memperkuat sektor pendidikan anak usia dini melalui peningkatan kapasitas tenaga pendidik serta penyediaan sarana dan prasarana PAUD yang lebih memadai.

“Kami akan memastikan generasi emas di Bumi Buton mendapatkan pendidikan yang layak, bermakna, dan menyenangkan. Dengan sinergi pemerintah daerah, tenaga pendidik, dan orang tua, generasi Buton yang cerdas dan berkarakter akan siap menghadapi masa depan,” katanya.

Ketua IGTKI Kabupaten Buton, Magfira Anirosita Ihi, S.Pd., MM, menjelaskan tema HUT IGTKI-PGRI tahun ini ialah “Guru TK Sejahtera, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Berkualitas sebagai Fondasi Wajib Belajar 13 Tahun”. Menurut dia, tema tersebut sejalan dengan arah pembangunan pendidikan nasional yang menempatkan PAUD sebagai fase penting pembentukan kualiti

tas sumber daya manusia.

“Mari jadikan HUT ke-76 IGTKI-PGRI ini sebagai momentum memperkuat semangat pengabdian, profesionalisme, dan kebersamaan memajukan pendidikan anak usia dini di Indonesia,” tutur Magfira saat membacakan sambutan Ketua IGTKI-PGRI Pusat.

Bunda PAUD Kabupaten Buton, Ny. Maimunah Moko Syarifudin Saafa, juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antara sekolah dan keluarga dalam mendukung tumbuh kembang anak. Ia meminta para guru terus berinovasi menghadirkan metode pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan.

“Libatkan orang tua sebagai mitra utama karena pendidikan terbaik adalah sinergi antara sekolah dan keluarga,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur HUT ke-76 IGTKI-PGRI. Selain itu, Direktorat Jenderal PAUD Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan penghargaan kepada Bunda PAUD Kabupaten Buton, Bunda PAUD Kecamatan Lasalimu Selatan, dan Bunda

PAUD Kelurahan Kambulambulana atas dukungan terhadap program wajib belajar 13 tahun dengan satu tahun prasekolah.

Secara historis, IGTKI-PGRI merupakan organisasi profesi guru taman kanak-kanak yang berdiri sejak 22 Mei 1950 dan menjadi bagian penting dalam perkembangan pendidikan anak usia dini di Indonesia. Secara global, perhatian terhadap pendidikan usia dini juga semakin menguat sejak UNESCO dan UNICEF pada awal 2000-an mendorong negara-negara dunia memperluas akses PAUD sebagai fondasi pembangunan kualitas manusia jangka panjang. Di Indonesia, komitmen itu diperkuat melalui kebijakan transisi PAUD ke sekolah dasar yang menyenangkan serta program wajib belajar 13 tahun yang mulai diperluas dalam beberapa tahun terakhir.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Buton bersama anggota DPRD, unsur Forkopimda, Wakil Ketua Bhayangkari, para kepala OPD, camat, serta Bunda PAUD tingkat kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Buton. (*)

Pemkab Buton Tengah Peringati Hari Kebangkitan Nasional Ke-118



Laporan: Ardi

BUTON TENGAH, BP-Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 tingkat Kabupaten Buton Tengah di halaman Kantor Bupati Bumi Praja Labungkari, Rabu (20/5/2026).

Upacara tersebut dihadiri Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, Wakil Bupati Buton Tengah, Muh. Adam Basan, Plh Sekretaris Daerah, pejabat eselon II, III, IV, staf ASN serta PPPK lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Azhari bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun ini mengusung tema ‘Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara.’ Tema tersebut merepresentasikan semangat menjaga generasi penerus bangsa sebagai fondasi utama dalam memperkuat kedaulatan nasional di tengah tantangan zaman yang terus berkembang.

Dalam sambutan Menteri Komunikasi dan Digital yang dibacakan Bupati Azhari disampaikan bahwa tanggal 20 Mei menjadi momentum penting dalam sejarah bangsa Indonesia yang merujuk pada berdirinya organisasi Budi Utomo pada ta-

hun 1908.

“Tepat pada hari ini, 20 Mei 2026, kita kembali merefleksikan momentum fundamental yang merujuk pada berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Sejarah men-catat bahwa peristiwa tersebut adalah fajar menyingsing bagi kesadaran berbangsa,” demikian kutipan sambutan Menteri yang dibacakan Bupati Azhari.

Disebutkan pula bahwa semangat tahun 1908 menjadi tonggak perubahan perjuangan bangsa, dari perlawanan fisik menuju perjuangan intelektual dan diplomatik demi mewujudkan kedaulatan bangsa yang bermartabat.

Secara filosofis, kebangkitan nasional dimaknai sebagai proses dinamis yang terus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa. Memasuki tahun 2026, tantangan bangsa disebut telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital.

Pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, lanjut sambutan tersebut, terus mendorong berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Di antaranya program makan bergizi gratis bagi pelajar, pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan sekolah rakyat dan sekolah Garuda, peningkatan kualitas guru, hingga penyediaan beasiswa untuk mengurangi

kesenjangan kualitas sumber daya manusia.

Di sektor kesehatan, pemerintah juga menghadirkan layanan cek kesehatan gratis guna memastikan perlindungan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Selain itu, penguatan ekonomi desa dilakukan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diarahkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di tingkat desa.

Sambutan Menteri juga menyoroti pentingnya perlindungan generasi muda di ruang digital melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP TUNAS. Kebijakan tersebut menjadi langkah pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan aman bagi anak-anak.

Melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026, seluruh elemen bangsa diajak untuk kembali menyalakan semangat persatuan, memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital serta memastikan pembangunan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Upacara berlangsung khidmat dan menjadi pengingat bahwa kebangkitan nasional merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri dan berdaulat. (*)

BNN-BPOM Bongkar Jaringan Narkoba Transnasional di Operasi Besar



Peliput: Andina L

JAKARTA, BP-Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM serta sejumlah lembaga penegak hukum berhasil membongkar jaringan narkoba transnasional dalam Operasi Saber Bersinar 2026. Operasi yang digelar lintas wilayah tersebut menyita ratusan kilogram narkoba dan sediaan farmasi ilegal dalam rangka memperkuat pengawasan terhadap peredaran gelap narkoba di Indonesia. Konferensi pers digelar di Gedung Utama BNN, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (19/5/2026).

Pengungkapan terbesar terjadi pada Selasa dini hari sekitar pukul 04.00 WIB ketika petugas gabungan menggagalkan penyelundupan jaringan Aceh-Bogor. Dalam operasi tersebut, aparat menyita 29 kilogram sabu kemasan teh Cina yang disembunyikan di kompartemen mobil Mitsubishi Pajero putih. Tiga orang tersangka diamankan, termasuk seorang oknum anggota Tentara Nasional Indonesia Tentara Na-

sional Indonesia.

Di lokasi lain, petugas juga mengungkap jaringan narkoba di Kalimantan Timur yang terafiliasi dengan buronan internasional. Sementara itu, di Sumatra Barat, aparat menyita 145 kilogram ganja kering dari beberapa titik operasi yang dilakukan secara simultan.

Selain narkoba, perhatian operasi juga tertuju pada peredaran sediaan farmasi ilegal, termasuk ketamin dan cairan vape yang mengandung etomidat. Pengawasan dilakukan ketat oleh BPOM sebagai bagian dari upaya melindungi masyarakat dari penyalahgunaan zat kimia berbahaya yang kini semakin marak di pasar gelap.

Plt. Deputi Pemberantasan BNN, Roy Hardi Siahaan, menegaskan bahwa operasi ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkoba. "Langkah BNN tidak akan berhenti. Kami terus melakukan operasi terhadap kawasan rawan narkoba untuk menyelamatkan generasi bangsa," ujarnya.

Deputi Bidang Penindakan BPOM, Tubagus Ade Hidayat, menekankan pentingnya batas hukum dalam

penanganan zat berbahaya. "Jika belum masuk kategori narkotika, maka pendekatannya menggunakan Undang-Undang Kesehatan. Sinergi ini penting agar tidak ada celah hukum bagi pelaku," katanya.

Operasi ini dilaksanakan secara terkoordinasi dengan menyoar zona merah narkoba seperti Kampung Ambon dan Kampung Bahari, serta sejumlah wilayah rawan lainnya. Pendekatan lintas lembaga melibatkan BNN, BPOM, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Kepolisian Republik Indonesia Kepolisian Republik Indonesia.

Secara historis, perang melawan narkoba di Indonesia tidak terlepas dari komitmen global sejak Konvensi Tunggal Narkotika PBB 1961 dan kebijakan "War on Drugs" yang dicanangkan Amerika Serikat pada era 1970-an. Indonesia sendiri membentuk BNN pada awal 2000-an sebagai respon terhadap meningkatnya kejahatan narkoba lintas negara.

Dalam konteks nasional, kawasan seperti Kampung Ambon di Jakarta dan Kam-

pung Bahari telah lama menjadi perhatian aparat sebagai titik rawan peredaran narkoba. Pola jaringan yang semakin terorganisir menunjukkan adanya keterkaitan dengan sindikat internasional yang memanfaatkan jalur darat, laut, dan udara.

BNN mencatat bahwa peredaran narkoba tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada stabilitas sosial dan ekonomi. Nilai barang bukti yang disita dalam operasi ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah dan berpotensi menyelamatkan jutaan jiwa dari risiko ketergantungan.

Keberhasilan Operasi Saber Bersinar 2026 menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi kejahatan narkoba modern yang semakin kompleks. Pendekatan terpadu antara penegakan hukum, pengawasan obat, dan kerja intelijen menjadi kunci utama dalam menutup ruang gerak sindikat.

Operasi ini menjadi pengingat bahwa perang melawan narkoba merupakan agenda berkelanjutan yang membutuhkan komitmen kolektif negara dan masyarakat. Upaya ini diharapkan memperkuat ketahanan sosial Indonesia dalam menghadapi ancaman narkoba global. (*)

Polusi Udara Ancam Semua Usia, Wamenkes Tekankan Sistem Data Terpadu



Peliput: Lisna

JAKARTA, BP-Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. Dante Saksono Harbuwono menegaskan urgensi penguatan sistem peringatan dini polusi udara berbasis data terpadu untuk melindungi masyarakat dari dampak kesehatan akibat pencemaran udara. Seruan tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional Sistem Peringatan Dini Polusi Udara yang digelar Universitas Indonesia bersama Research Center for Climate Change (RCCC UI) di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (18/5).

Dalam forum ilmiah tersebut, Dante Saksono Harbuwono menyoroti kondisi polusi udara yang kerap tidak disadari masyarakat, khususnya di kawasan Jabodetabek. Ia menggambarkan fenomena visual kabut abu-abu yang menutupi pandangan gunung di sekitar Jakarta sebagai indikasi nyata kualitas udara yang memburuk.

"Ketika pagi cerah, kita bisa melihat Gunung Salak dan Gunung Gede. Namun pada hari biasa, pemandangan itu tertutup kabut abu-abu.

Itulah polusi udara yang kita hirup setiap hari," ujarnya dalam keynote speech.

Dante menegaskan bahwa polusi udara merupakan ancaman lintas kelompok usia. Mengacu pada data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), disebutkan bahwa sembilan dari sepuluh orang di dunia hidup di wilayah dengan kualitas udara yang telah tercemar.

Ia merinci dampak kesehatan yang ditimbulkan, mulai dari anak-anak yang rentan mengalami pneumonia dan gangguan tumbuh kembang, hingga lansia yang berisiko mengalami penurunan fungsi organ. Sementara itu, penderita penyakit kronis dapat mengalami perburukan kondisi, dan pekerja luar ruangan berisiko terkena penyakit paru obstruktif kronis (PPOK).

Lebih lanjut, Kementerian Kesehatan disebut terus memperkuat transformasi layanan kesehatan, khususnya pada aspek promotif dan preventif untuk menghadapi dampak polusi udara. Namun, Dante menilai tantangan utama saat

ini adalah belum tersedianya sistem data terpadu yang menghubungkan kualitas udara dengan dampak kesehatan secara langsung.

"Celah ini menjadi peluang untuk membangun sistem peringatan dini berbasis integrasi data yang kuat," katanya, seraya mendorong kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pengembangan sistem tersebut.

Sementara itu, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof. Dr. Indri Hapsari Susilowati, menekankan pentingnya keterkaitan antara kesehatan manusia dan keberlanjutan ekosistem. Ia menyebut isu kesehatan kini tidak dapat dipisahkan dari perubahan lingkungan global.

Seminar nasional yang turut melibatkan akademisi, pemerintah, peneliti, hingga pegiat lingkungan tersebut diharapkan menjadi ruang kolaborasi untuk merumuskan kebijakan dan aksi nyata dalam pengendalian polusi udara di Indonesia. (*)

PT FAREN GRAFIKA

Harian Pagi
Baubau Post

KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN

Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik

Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi

Pemimpin Umum: Fauzan NWA
Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi
Redpel: Prasetyo
Korlip: Firman
Redaktur: Kasrun, Rahim
Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman

Layouter: Ririn
Pracetak: Aditya
Cetak Jamaludin

Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara
Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com

Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara

Penerbit: PT FAREN GRAFIKA
Komisaris: Erna Agule
Direktur Utama: Andina Latief
Manager Keuangan: Nabila DAA
Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin
Kepala Sirkulasi: Robi
Administrasi: Salvana

Kepala Biro Wakatobi: Risman
Kepala Biro Buton Utara: Kasrun
Kepala Biro Buton: La Harman
Kepala Biro Buton Selatan: Firman
Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin
Kepala Biro Sultra: Masuri

Agen Baubau: Jamaluddin
Agen Buton Selatan: Firman
Agen Buton: Samrihan
Agen Buton Utara: Kasrun

Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan,
Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks

Polres Baubau Peringati Harkitnas ke-118, Tekankan Perlindungan Generasi Muda di Era Digital



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP- Kepolisian Resor Baubau menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 Tahun 2026 di Lapangan Apel Wicaksana Laghawa, Rabu (20/5/2026) pagi.

Upacara berlangsung khidmat dengan mengusung tema 'Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara.' Wakapolres Baubau, Andi Usri, bertindak sebagai inspektur upacara mewakili Kapolres Baubau.

Dalam kesempatan

tersebut, Wakapolres membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang menekankan pentingnya memaknai kembali semangat kebangkitan nasional yang diawali berdirinya Boedi Oetomo pada 1908. Momentum itu dinilai relevan dengan tantangan bangsa saat ini, yang tidak lagi semata berkaitan dengan kedaulatan wilayah, tetapi juga kedaulatan informasi dan transformasi digital.

Usai upacara, Kompol Andi Usri menegaskan bahwa tema Harkitnas tahun ini menjadi pengingat

penting untuk menjaga generasi muda sebagai aset utama bangsa.

"Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 ini menjadi momentum bagi kita semua untuk menjaga tunas bangsa sebagai aset tertinggi kedaulatan negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polres Baubau, berkomitmen mendukung program strategis nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis demi memperkuat fondasi fisik generasi masa depan," ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan anak di era digital, termasuk melalui pen-

erapan PP Nomor 17 Tahun 2025 (PP TUNAS) yang mengatur pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.

"Tantangan hari ini bukan lagi angkat senjata, melainkan bagaimana kita melindungi anak-anak kita dari dampak negatif ruang digital. Kebangkitan nasional harus dimulai dari kesadaran kita untuk menjaga masa depan mereka," tegasnya.

Untuk diketahui, upacara diikuti seluruh pejabat utama, perwira, dan personel Polres Baubau dan berakhir pada pukul 08.30 WITA dalam situasi aman dan kondusif. (*)

200 Kg Ganja Dimusnahkan, Polisi Ungkap Ladang di Empat Lawang

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP- Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memusnahkan 200 kilogram ganja hasil pengungkapan ladang narkotika seluas 20 hektare di Kabupaten Empat Lawang. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatera Selatan Irjen Sandi Nugroho sebagai bagian dari upaya pemberantasan jaringan narkoba di daerah tersebut.

Pengungkapan ladang ganja itu berlokasi di Desa Batu Junggul, Kecamatan Muara Pinang, yang ditemukan pada 13 Februari lalu. Dari lokasi tersebut, polisi menyita ganja kering yang dikemas dalam sembilan karung sebelum akhirnya dimusnahkan.

Kapolda Sandi Nugroho menegaskan



bahwa pemusnahan barang bukti ini merupakan langkah strategis untuk melindungi generasi muda dari ancaman narkotika yang semakin masif. "Ini bukan sekadar penegakan hukum, tetapi upaya menyelamatkan masa depan bangsa dari bahaya narkoba," ujarnya.

Dalam operasi tersebut, polisi telah menetapkan lima orang tersangka. Dua orang berinisial RS

dan A saat ini menjalani proses penyidikan intensif, sementara tiga lainnya yakni EA, YA, dan PHR masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Sandi juga menyebutkan bahwa Polri terus mengembangkan pendekatan berbasis teknologi melalui Scientific Crime Investigation untuk memperkuat pengungkapan jaringan narkotika. Menurutnya, teknolo-

gi harus berjalan beriringan dengan intelijen dan partisipasi masyarakat.

"Polri terus mengembangkan Scientific Crime Investigation dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, tetapi tetap membutuhkan kerja sama masyarakat untuk memutus jaringan narkoba sampai ke akarnya," kata Sandi.

Dari sisi pencegahan, ia menekankan bahwa ancaman nar-

Empat Prajurit TNI Jalani Sidang Tuntutan Kasus Air Keras Aktivistis



Empat prajurit TNI menghadapi sidang pembacaan tuntutan terkait kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus, di Pengadilan Militer.

Laporan: Amran

JAKARTA, BP- Empat personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (20/5), dalam perkara dugaan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus. Perkara ini menjadi sorotan karena melibatkan dugaan kekerasan berat yang menyeret aparat militer terhadap aktivis sipil.

Sidang digelar di ruang Garuda Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan dipimpin oleh Hakim Ketua Kolonel Corps Hukum (Chk) Fredy Ferdian Isnartanto. Dalam persidangan tersebut, jaksa militer membacakan tuntutan terhadap empat terdakwa yang seluruhnya merupakan prajurit aktif TNI.

Empat terdakwa dalam perkara ini masing-masing adalah Sersan Dua Edi Sudarko, Letnan Satu (Lettu) Budhi Hariyanto Widhi, Kapten Nandala Dwi Prasetya, dan Lettu Sami Lakka. Mereka diduga terlibat dalam perencanaan hingga pelaksanaan penyiraman cairan kimia berbahaya kepada korban.

Dalam dakwaan, tindakan tersebut disebut dilakukan dengan motif untuk "memberikan pelajaran" dan "efek jera" kepada korban. "Tujuannya agar korban tidak menjelekkan in-

stitusi TNI," demikian isi uraian dakwaan yang terungkap dalam persidangan.

Peristiwa yang menjadi latar kasus ini terjadi pada 16 Maret 2025, saat Andrie Yunus menghadiri rapat revisi Undang-Undang TNI di Jakarta. Saat itu, ia disebut melakukan interupsi dalam forum yang tengah berlangsung.

Jaksa juga menguraikan bahwa tindakan korban sebelumnya, termasuk gugatan uji materi Undang-Undang TNI ke Mahkamah Konstitusi serta kritik terhadap institusi militer, menjadi salah satu pemicu kemarahan para terdakwa. Dalam berkas perkara, disebutkan pula adanya tuduhan yang dilontarkan korban terkait dugaan intimidasi.

"Tindakan tersebut dilakukan secara terencana," demikian salah satu kutipan dakwaan yang dibacakan di persidangan, merujuk pada proses perencanaan penyiraman cairan kimia yang diketahui dapat menyebabkan luka bakar serius.

Sidang yang digelar di Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut berlangsung di tengah sorotan publik terhadap akuntabilitas aparat. Kasus ini kembali menempatkan relasi antara aparat negara dan aktivis sipil dalam perhatian luas.

Secara historis, kasus kekerasan terhadap aktivis di Indonesia bukan hal baru.

seperti Golden Triangle di Asia Tenggara.

Kegiatan pemusnahan turut disaksikan oleh Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad, unsur Forkopimda, serta tokoh masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemberantasan narkoba di daerah.

Kasus ini sekaligus

Pada 2017, serangan penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan menjadi salah satu kasus paling menonjol yang memicu kritik terhadap penegakan hukum. Sementara itu, KontraS sejak lama dikenal sebagai organisasi yang aktif mengadvokasi kasus pelanggaran hak asasi manusia sejak era reformasi 1998.

Di tingkat global, serangan menggunakan cairan asam juga tercatat sebagai isu serius, terutama di beberapa negara Asia Selatan dan Eropa, yang mendorong lahirnya regulasi ketat terkait distribusi bahan kimia berbahaya. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan berbasis bahan kimia memiliki dampak luas dan menjadi perhatian internasional dalam isu perlindungan sipil.

Para terdakwa dijerat dengan Pasal 469 ayat (1) atau Pasal 468 ayat (1) atau Pasal 467 ayat (1) juncto ayat (2) jo. Pasal 20 huruf C Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Ancaman pidana dalam pasal tersebut mencakup tindak kekerasan berat yang mengakibatkan luka serius.

Perkara ini akan berlanjut ke tahap berikutnya dalam persidangan militer untuk mendengarkan putusan dan proses pembuktian lanjutan. Pengadilan Militer II-08 Jakarta menegaskan bahwa proses hukum akan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa pengecualian. (*)

menegaskan komitmen aparat dalam memutus mata rantai produksi dan distribusi narkotika di tingkat lokal yang memiliki keterkaitan dengan jaringan yang lebih luas. Aparat menilai keberhasilan pengungkapan ladang ganja ini tidak lepas dari sinergi antara kepolisian dan masyarakat di lapangan. (*)

Pemkot Baubau Bongkar Menara Pandang Pantai Nirwana Demi Keselamatan



Pemerintah Kota Baubau mengeksekusi pembongkaran Menara Pandang di kawasan wisata Pantai Nirwana, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Selasa (19/5/2026)

Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau mengeksekusi pembongkaran Menara Pandang di kawasan wisata Pantai Nirwana, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Selasa (19/5/2026), setelah struktur bangunan dinyatakan berada dalam kondisi kritis dan berpotensi membahayakan keselamatan publik. Langkah tersebut dilakukan melalui tim teknis gabungan lintas sektor dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Baubau sebagai leading sector. Keputusan pembongkaran diambil berdasarkan hasil evaluasi teknis mendalam dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Baubau serta usulan kedaruratan bencana dari BPBD. Kajian tersebut menemukan adanya korosi berat akibat paparan air laut serta keretakan pada balok dan kolom utama pen-

yangga bangunan.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Baubau, La Ode Muslimin Hibali, mengatakan kondisi menara sudah tidak layak dipertahankan karena risiko keruntuhan dinilai dapat terjadi sewaktu-waktu. "Langkah cepat mitigasi darurat ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk melindungi keselamatan pengunjung, pedagang, dan masyarakat di sekitar kawasan wisata," ujarnya dalam keterangan pers, Selasa (19/5/2026).

Menurut Muslimin, pembongkaran menjadi pilihan paling rasional setelah tim teknis menilai tingkat kerusakan struktur sudah memasuki fase kritis. Potensi kegagalan konstruksi dinilai sangat tinggi mengingat lokasi bangunan berada di kawasan pesisir dengan paparan korosi air laut yang agresif sepanjang tahun.

Pemerintah Kota Baubau mengakui Menara Pandang sela-

ma ini menjadi salah satu titik favorit wisatawan di Pantai Nirwana. Namun, faktor keselamatan publik disebut tidak dapat dipromosikan meskipun fasilitas tersebut memiliki nilai estetika dan daya tarik wisata.

"Keselamatan jiwa manusia harus ditempatkan di atas kepentingan lainnya, termasuk aspek wisata. Karena itu, pembongkaran ini dilakukan untuk mencegah potensi bencana di ruang publik," kata Muslimin.

Ia menambahkan, penataan ulang kawasan Pantai Nirwana akan menjadi bagian dari program jangka panjang pemerintah daerah guna menghadirkan kawasan wisata yang lebih aman, tertib, dan representatif. "Pembersihan ini menjadi babak awal penataan lanskap Pantai Nirwana agar memiliki estetika yang lebih baik di masa mendatang," katanya.

Secara historis, pembongkaran fasilitas publik di kawasan

pesisir akibat korosi bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Sejumlah daerah wisata pantai seperti di Ancol Jakarta hingga kawasan pesisir Bali pernah melakukan revitalisasi fasilitas karena ancaman kerusakan struktur akibat udara laut yang mengandung kadar garam tinggi. Secara internasional, negara-negara seperti Jepang dan Australia juga menerapkan inspeksi berkala ketat terhadap bangunan pesisir untuk mencegah kegagalan konstruksi yang dapat memicu korban jiwa.

Pantai Nirwana sendiri dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kota Baubau yang menjadi pusat aktivitas wisata bahari masyarakat lokal maupun wisatawan luar daerah. Pemerintah daerah berharap penataan ulang kawasan tersebut nantinya dapat memperkuat citra wisata Kota Baubau sebagai destinasi pesisir yang aman dan berkelanjutan. (*)

Hadapi Lonjakan Harga, Pemkot Baubau Gelar GPM untuk Masyarakat di Stadion Betoambari



merintah Kota Baubau melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Stadion Betoambari, Selasa (19/5/2026)

Pewarta: Amat Jr

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Stadion Betoambari, Selasa (19/5/2026), guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau, Ibnu Wahid, ST., MM., yang hadir mewakili Sekretaris Daerah Kota Baubau. Program itu merupakan bagian dari gerakan nasional yang dilaksanakan serentak di berbagai daerah di Indonesia.

Ibnu Wahid mengatakan, Gerakan Pangan Murah menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih ter-

jangkau menjelang perayaan hari besar keagamaan.

Menurutnya, pelaksanaan pasar murah di Kota Baubau dilakukan secara berkesinambungan oleh sejumlah instansi pemerintah. Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian, sementara Pemerintah Provinsi juga dijadwalkan menggelar gerakan pangan murah di kawasan Lembah Hijau dalam waktu dekat.

Ia menuturkan, langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok yang kerap terjadi menjelang Idul Adha pada 27 Mei mendatang. Pemerintah daerah pun berupaya menjaga stabilitas pasokan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Dalam pelaksanaannya, Pemkot Baubau menerapkan tiga prinsip utama, yakni menjamin keterse-

diaan, keterjangkauan, dan kebermanfaatan pangan bagi masyarakat luas.

Untuk memastikan stok pangan aman, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berkolaborasi dengan berbagai pihak, di antaranya Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Perum BULOLOG, serta sejumlah distributor utama di Kota Baubau.

Berbagai komoditas yang dijual dalam kegiatan tersebut meliputi beras, minyak goreng, telur ayam, bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, gula pasir, dan sejumlah bahan pokok penting lainnya.

Di akhir kegiatan, Ibnu Wahid mengimbau masyarakat agar memanfaatkan program tersebut dengan tertib dan bijak sehingga pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dapat berjalan lancar serta memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan ketahanan pangan keluarga. (*)

Pemkot Baubau Percepat Transformasi Digital Birokrasi Lewat SRIKANDI Mulai 1 Juni

Laporan: Andina L

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau menargetkan seluruh layanan administrasi pemerintahan di lingkup organisasi perangkat daerah (OPD) mulai menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) secara penuh pada 1 Juni 2026. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari

percepatan reformasi birokrasi berbasis digital guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

Komitmen itu ditegaskan dalam kegiatan Penerapan dan Percepatan Aplikasi SRIKANDI Lingkup Pemerintah Kota Baubau yang berlangsung di Aula Gedung Perpustakaan Umum Kota Baubau, Selasa (19/05/2026). Kegiatan tersebut di-

buka Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Baubau, Arlis, dan dihadiri perwakilan OPD se-Kota Baubau.

Menurut Arlis, transformasi pelayanan pemerintahan dari pola konvensional menuju sistem digital merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi. "Layanan publik saat ini tidak bisa lagi bergerak menggunakan deret

hitung yang lambat. Kita harus melompat menggunakan deret ukur dengan pelipatan waktu yang didorong visi besar bersama," ujarnya.

Ia menjelaskan, penerapan SRIKANDI merupakan tindak lanjut arahan pimpinan daerah, mulai dari Wali Kota Baubau, Wakil Wali Kota, hingga Sekretaris Daerah, agar tata kelola administrasi pemerintahan menjadi lebih efektif,

efisien, transparan, dan akuntabel. Pemerintah daerah, kata dia, ingin memastikan seluruh proses surat-menyerurat dan pengarsipan berjalan secara elektronik dan terintegrasi.

"Per 1 Juni 2026 seluruh layanan administrasi pemerintahan ditargetkan sudah wajib menggunakan aplikasi SRIKANDI," kata Arlis. Meski demikian, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tetap membuka ruang koordinasi terhadap kebutuhan administrasi tertentu yang masih membutuhkan masa transisi dari sistem manual menuju digital.

Penerapan SRIKANDI sendiri merupakan bagian dari kebijakan nasional transformasi digital birokrasi yang mulai diperkuat pemerintah pusat sejak pandemi Covid-19 pada 2020.

Secara nasional, aplikasi ini dikembangkan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bersama Kementerian PAN-RB, Kementerian Kominfo, dan Badan Siber dan Sandi Negara guna menciptakan sistem administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi antarlembaga.

Dalam catatan internasional, digitalisasi administrasi pemerintahan telah menjadi tren global sejak dua dekade terakhir. Negara-negara seperti Estonia, Korea Selatan, dan Singapura berhasil memangkas birokrasi pelayanan publik melalui sistem pemerintahan elektronik atau e-government yang terintegrasi. Indonesia sendiri mulai mempercepat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sejak diterbitkannya Peraturan

Presiden Nomor 95 Tahun 2018.

Arlis menilai kegiatan percepatan implementasi SRIKANDI menjadi momentum penting untuk membangun kesamaan visi antarlembaga di Kota Baubau. "Kegiatan ini adalah bukti nyata komitmen bersama untuk saling inspirasi dan pengalaman demi menyukseskan penerapan SRIKANDI," katanya.

Di akhir sambutannya, Arlis mengingatkan seluruh aparatur sipil negara agar menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. "Jangan pernah mengecilkan peran yang sementara diamanahkan pimpinan kepada kita. Kita tidak pernah tahu di titik amarah mana yang menjadi loncatan nyata bagi karier kita ke depan," ujarnya. (*)